

## PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KECAMATAN SILIMAKUTA

Sri Andika Sirait<sup>1</sup>, Poltak Theodorus Parhusip<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas

Email: sri.andika8008@gmail.com<sup>1</sup>, ikoparhusip17@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of the implementation of good governance on the performance of village financial management in Silimakuta sub-district. This study used primary data of 60 people from the village government apparatus of Sinar Baru and Purba Sinombah with the sampling technique used was purposive sampling. The data analysis techniques used are multiple linear regression analysis using the SPSS 22 program and hypothesis testing using t test and F test with a significance level of 5%.*

*From the results of testing using SPSS, it is known that, the results of hypothesis testing with F test (simultaneous) show that the implementation of good governance has a significant effect on the performance of village financial management, this is obtained from the  $t_{table} >$  calculation, which is  $16,680 > 3,156$  and a significance value of  $0.000 < 0.05$ . The results of hypothesis testing with a t test (partial) show that the variable of transparency application has a significant effect on the performance of village financial management, this is obtained from the  $t_{table} > t_{cal}$ , which is  $5,106 > 1,672$  and a significance value of  $0.002 < 0.05$ , which means that if the implementation of the principle of transparency in village financial management will have a positive impact on governance and will increase the accountability of the village government, Then the performance of village financial management will improve for the better. The variable of the application of accountability has a significant effect on the performance of village financial management, this is obtained from the calculation of the  $t_{table} >$ , namely increasing trust and satisfaction with financial management by the village government, the performance of village financial management will improve for the better.*

**Keywords:** *Good Governance, Transparency, Accountability, and Performance of Village Financial Management.*

### PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besarnya Dana Desa untuk setiap desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

*Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat

memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Konsep *good governance* ini digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak di topang oleh prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adanya penerapan *good governance* dapat mengembangkan keuangan tingkat desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana di tingkat desa. Dalam rangka pengelolaan anggaran belanja, lebih bertanggung jawab dan terealisasi dengan baik maka diperlukan penerapan *good governance* dimana untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, maka pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Dibalik besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, terdapat kekhawatiran yang tidak kalah besarnya. Apabila dalam pengelolaan dana desa tersebut pemerintah desa tidak disertai transparansi dan akuntabilitas maka akan berpotensi terjadinya penyimpangan.

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 ada 3 indikator dalam pengukuran kinerja yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Indikator tersebut dapat dijabarkan dalam konsep pengukuran kinerja yang disebut *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

**Tabel 1 Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Pemerintahan Desa Sinar Baru dan Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta Tahun 2019 – 2021**

Nama Desa	Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih Kurang
Sinar Baru	2019	Rp 759.051.000	Rp 738.783.791	Rp 20.267.209
	2020	Rp 743.746.000	Rp 756.098.300	(Rp 12.352.300)
	2021	Rp 742.196.000	Rp 707.296.275	Rp 34.899.725
Purba Sinombah	2019	Rp 746.812.000	Rp 642.285.062	Rp 104.526.938
	2020	Rp 734.140.000	Rp 679.513.179	Rp 54.626.821
	2021	Rp 729.236.000	Rp 683.656.421	Rp 45.579.579

Sumber : Kantor Kepala Desa Sinar Baru dan Purba Sinombah

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan dari tahun 2019- 2021 pada desa Sinar Baru dan Purba Sinombah ternyata setiap tahunnya memiliki sisa anggaran belanja yang cukup besar. Terutama di tahun 2019 terdapat sisa sebesar Rp. 104.526.938. Hal ini sudah menjadi fenomena didalam yang namanya anggaran desa. Aparat pemerintah desa masih memiliki keterbatasan baik dari segi pemahaman peraturan pemerintah dan juga pemahaman kemampuan dalam hal mengelola anggaran dana desa. Kinerja aparatur pemerintah desa pada penerapan *good governance* dalam pelaksanaan program kegiatan alokasi anggaran desa masih kurang optimal. Kurangnya komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat dan kualitas pelayanan yang masih rendah serta

prinsip transparansi yang belum sepenuhnya dilaksanakan terkait belum ada informasi mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang di informasikan kepada masyarakat, ini mengakibatkan indikator produktivitasnya masih banyak program serta pelayanan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran belanja desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2012:12), merumuskan arti *good governance* yaitu pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

### Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

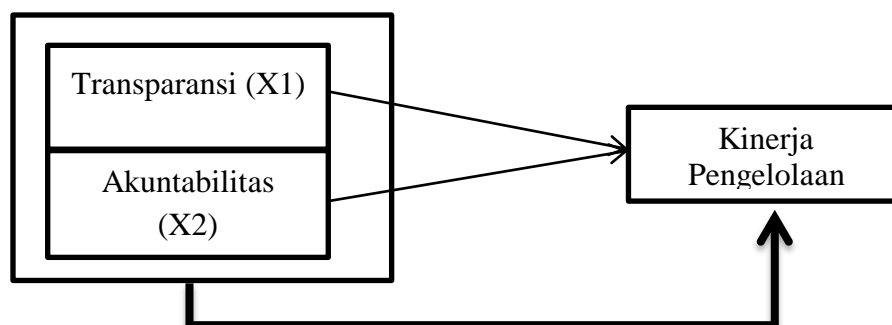
### Akuntabilitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Kinerja Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan juga bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

### Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

## Perumusan Hipotesis

Berdasarkan telaah teoritis, hasil-hasil penelitian serta kerangka berpikir maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

- H<sub>1</sub> : Penerapan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Silimakuta.
- H<sub>2</sub> : Penerapan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Silimakuta.
- H<sub>3</sub> : Penerapan *good governance* yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Silimakuta.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa dari Purba Sinombah dan Sinar Baru. Menurut Sugiyono (2009: 91) menyebutkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang aparatur pemerintah desa Purba Sinombah dan desa Sinar Baru kecamatan Silimakuta.

### Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner diberikan kepada aparatur pemerintah di desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta. Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu model regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan fungsional.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Variabel Penelitian

#### Variabel Transparansi (X<sub>1</sub>)

Dalam mendeskripsikan variabel transparansi maka dapat dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan atau indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pada pemerintahan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta.

**Tabel 2 Deskripsi Variabel Transparansi (X<sub>1</sub>)**

Tanggapan	Skor	X <sub>1.1</sub>	X <sub>1.2</sub>	X <sub>1.3</sub>	X <sub>1.4</sub>
Sangat tidak setuju	1	0%	0%	0%	0%
Tidak setuju	2	0%	0%	0%	0%
Netral	3	9%	7%	11%	20%
Setuju	4	83%	82%	72%	67%
Sangat setuju	5	8%	11%	17%	13%
<b>Mean Skor Indikator</b>		<b>3.99</b>	<b>4.86</b>	<b>4.06</b>	<b>3.93</b>
<b>Mean Skor Variabel</b>		<b>4.21</b>			

### Variabel Akuntabilitas ( $X_2$ )

Dalam mendeskripsikan variabel akuntabilitas maka dapat dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan atau indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pada pemerintahan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta.

**Tabel 3 Deskripsi Variabel Akuntabilitas ( $X_2$ )**

Tanggapan	Skor	X <sub>2.1</sub>	X <sub>2.2</sub>	X <sub>2.3</sub>	X <sub>2.4</sub>
Sangat tidak setuju	1	0%	0%	0%	0%
Tidak setuju	2	0%	0%	0%	0%
Netral	3	23%	8%	17%	13%
Setuju	4	70%	87%	75%	72%
Sangat setuju	5	7%	5%	8%	15%
<b>Jumlah</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Mean Skor Indikator</b>		<b>3.84</b>	<b>3.97</b>	<b>3.16</b>	<b>4.02</b>
<b>Mean Skor Variabel</b>		<b>3.75</b>			

Sumber : Data diolah

### Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa(Y)

Deskripsi terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan atau indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta. Kinerja pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta (Y) diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas.

**Tabel 4 Deskripsi Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa(Y)**

Tanggapan	Skor	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6
Sangat tidak setuju	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tidak setuju	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Netral	3	8%	18%	17%	10%	27%	13%
Setuju	4	75%	70%	70%	68%	56%	75%
Sangat setuju	5	17%	12%	13%	22%	17%	12%
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>
<b>Mean Skor Indikator</b>		<b>4.09</b>	<b>3.94</b>	<b>3.96</b>	<b>4.12</b>	<b>3.9</b>	<b>3.99</b>
<b>Mean Skor Variabel</b>		<b>4.0</b>					

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

**Tabel 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi (r-hitung)	r-tabel	Validitas	Alpha Cronbach (Reliabilitas)
<i>Good Governance</i> (X)	X1.1	0.482	0.25	Valid	0.648
	X1.2	0.382	0.25	Valid	
	X1.3	0.461	0.25	Valid	
	X1.4	0.719	0.25	Valid	
	X2.1	0.467	0.25	Valid	0.635

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi (r-hitung)	r-tabel	Validitas	Alpha Cronbach (Reliabilitas)
	X2.2	0.396	0.25	Valid	0.752
	X2.3	0.505	0.25	Valid	
	X2.4	0.647	0.25	Valid	
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Y.1	0.587	0.25	Valid	
	Y.2	0.663	0.25	Valid	
	Y.3	0.674	0.25	Valid	
	Y.4	0.745	0.25	Valid	
	Y.5	0.628	0.25	Valid	
	Y.6	0.481	0.25	Valid	

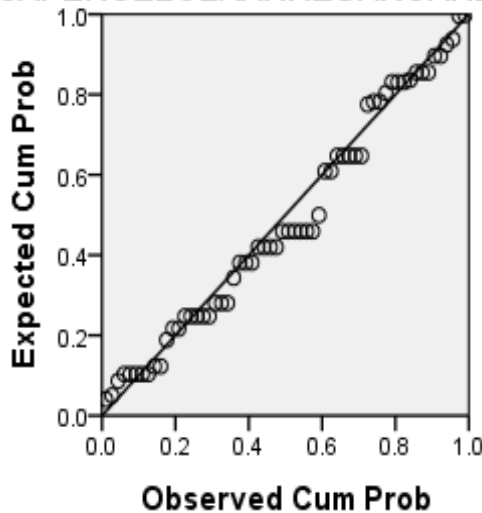
Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi ( $r_{hitung}$ ) seluruh pernyataan lebih besar dari  $r_{tabel}$  (0.254) maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Demikian pula terhadap nilai *Cronbach-Alpha* dari masing-masing variabel menunjukkan angka lebih besar dari 0.60 sehingga dapat dikatakan instrument penelitian adalah reliabel.

**Uji Normalitas**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Dependent Variable:  
KINERJAPENGLOLAANKEUANGANDESA

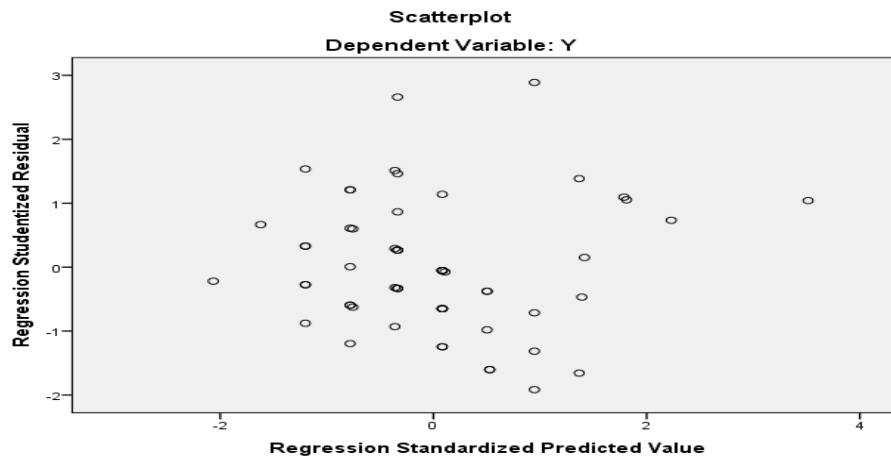


**Gambar 2 Hasil Uji Normalitas**

Dari gambar grafik diatas menunjukkan pola grafik yang normal, terlihat dari titik distribusi data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Artinya data berdistribusi normal dan asumsi kenormalan terpenuhi.



**Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai-nilai residunya menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.064	4.784		.432	.668		
X1	1.100	.215	.538	5.106	.002	.997	1.114
X2	.534	.223	.252	2.394	.020	.866	1.004

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai VIF dari variabel *good governance* dan kinerja pengelolaan keuangan desa lebih kecil dari 10 (  $VIF < 10$  ), berarti tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Sedangkan nilai tolerance dari variabel *good governance* dan kinerja pengelolaan keuangan desa lebih besar dari 0.10 (Nilai tolerance  $> 0,10$  ), berarti tidak terdapat multikolinoeritas antar variabel independen.

**Analisis Linear Berganda**

**Tabel 7 Hasil Uji Analisis Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.064	4.784		432	.668

X1	1.100	.215	.538	5.106	.002
X2	.534	.223	.252	2.394	.020

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 2.064 + 1.100 X_1 + 0.534 X_2 + e$$

Pada persamaan regresi tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Konstanta (a) = 2.064 ini mempunyai arti bahwa apabila variabel transparansi (X<sub>1</sub>) dan akuntabilitas (X<sub>2</sub>) adalah nol. Hal ini akan menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan desa akan positif, jika tidak terdapat variabel *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas.
- Koefisien (b<sub>1</sub>) = 1.100 pengaruh variabel transparansi (X<sub>1</sub>) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) didapatkan koefisien regresi sebesar 1.100 mempunyai arti bahwa jika terjadi kenaikan variabel transparansi (X<sub>1</sub>) sebesar 1 satuan, maka nilai kinerja keuangan desa (Y) akan meningkatkan sebesar 1.100.
- Koefisien (b<sub>2</sub>) = 0.534 pengaruh variabel akuntabilitas (X<sub>2</sub>) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) didapatkan koefisien regresi sebesar 0.534 mempunyai arti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel akuntabilitas (X<sub>2</sub>) sebesar 1 satuan, maka nilai kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) akan meningkatkan sebesar 0.534.

### Koefisien Korelasi

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Korelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.808 <sup>a</sup>	.639	.347	1.69296	.639	16.680	2	57	.000	1.765

a. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub>

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R = 0.808 yang berarti bahwa hubungan antara variabel bebas (X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>) secara serentak dengan variabel terikat (Y) dalam kategori sangat kuat.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.808 <sup>a</sup>	.639	.347	1.69296	.639	16.680	2	57	.000	1.765

a. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub>



b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai R Square = 0.639 menunjukkan bahwa variabel kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) dapat dijelaskan oleh transparansi dan akuntabilitas sebesar 63,9%, sedangkan sisanya sebesar 36,1% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Simultan (Uji- F)

**Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji- F)**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	95.615	2	47.808	16.680	.000 <sup>b</sup>
Residual	163.368	57	2.866		
Total	258.983	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan nilai  $F_{hitung}$  adalah 16.680 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan  $F_{tabel}$  adalah 3.156. oleh karena pada kedua perhitungan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $16.680 > 3.156$ ) dan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$ , maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berupa variabel transparansi ( $X_1$ ) dan akuntabilitas ( $X_2$ ) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat kinerja pengelolaan keuangan desa (Y).

### Uji Parsial (Uji- t)

**Tabel 11 Hasil Uji Uji Parsial (Uji- t)**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.064	4.784		432	.668
X1	1.100	.215	.538	5.106	.002
X2	.534	.223	.252	2.394	.020

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai  $t_{hitung}$  Variabel transparansi ( $X_1$ ) adalah  $5.106 > T_{tabel} = 1.672$  dan nilai signifikansi adalah 0.002, nilai ini lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  (0,05). Hal ini berarti transparansi ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y). Nilai  $t_{hitung}$  variabel akuntabilitas ( $X_2$ ) adalah  $2.394 > T_{tabel} = 1.672$  maka nilai signifikansi adalah 0.020, nilai ini lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  (0,05). Hal ini berarti akuntabilitas ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y).

## Kesimpulan

1. Nilai  $t_{hitung}$  Variabel transparansi ( $X_1$ ) adalah  $5.106 > T_{tabel} = 1.672$  dan nilai signifikansi adalah 0.002, nilai ini lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  (0,05). Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel transparansi ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta.
2. Nilai  $t_{hitung}$  variabel akuntabilitas ( $X_2$ ) adalah  $2.394 > T_{tabel} = 1.672$  dan nilai signifikansi adalah 0.020, nilai ini lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  (0,05). Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta
3. Dari hasil perhitungan Uji F (simultan) menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *good governance* yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Sinar Baru dan Purba Sinombah sebaiknya melakukan musyawarah kembali setelah kegiatan atau program desa yang dilaksanakan selesai agar masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran dan pemerintah desa bisa menampung segala usulan atau masukan dari masyarakat.
2. Pemerintah desa Sinar Baru dan Purba Sinombah diharapkan pada setiap program, kegiatan ataupun pengelolaan keuangan desa dapat memperhatikan segala aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas agar pengelolaan keuangan desa di kelola dan di dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Vivid. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 4, No.1.
- Apriani, Sari. 2015. Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Organisasi dilihat dari Persepsi Pegawai. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Azlina, Nur dan Ira Amelia. 2014. Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol.12, No.2.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Christy, Irene Sekar Lintang. 2020. Pengaruh *Good Governance* dan sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

- Efendi, Ruslan. 2021. Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan). *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Ghazalah, Karlina. 2016. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik* . Jakarta: Salemba Empat.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lembaga Administrasi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LAN & BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance* . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Edisi Pertama BPFE
- Moenek, Reydonnyzar dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance Pengelolaan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasrun, Muhammad. 2018. Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Equilibrium Universitas Muhammadiyah Makassar*. Vol. 0, No. 0.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Raheni, Ni Putu Rika dan I.G.A.M Asri Dwija Putri. 2019. Pengaruh *Good Governance* dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.28, No.2.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintergrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.

- Saragih, A. E., & Sihombing, U. T. (2021). Pengaruh Intellectual Capital, Good Corporate Governance, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1-17.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Kepemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju .
- Sudarmanto, R. Gunawan, 2005. *Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Ghalia Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Vivid, Annisa. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon Universitas Riau*. Vol. 4, No. 1.
- Wibowo, Rino Pandhu. 2018. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (studi Kasus pada Pemerintah Desa Banjararum). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.